

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI
KHUSUS PADA ALOKASI BELANJA MODAL
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO**

*(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2016)*

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

**Arisna Salsabillah
145020101111003**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS PADA ALOKASI
BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO**

(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016)

Yang disusun oleh :

Nama : Arisna Salsabillah
NIM : 145020101111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 April 2018

Malang, 07 Mei 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Susilo, SE., MS.
NIP. 196010301986011001

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS PADA ALOKASI BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016)

Arisna Salsabillah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email : arisnasalsabillah6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi Belanja Modal (BM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) studi pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016. Penelitian ini memoderasi variabel PAD, DAU, dan DAK dengan menggunakan variabel interaksi yakni Belanja Modal (BM) terhadap PDRB. Variabel independen lainnya yang digunakan sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi PDRB ialah Tenaga Kerja (TK) dan Investasi (INV). Sedangkan, variabel dependennya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan Tujuan tersebut maka, metode analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis menggunakan data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pada alpha 5 persen variabel yang diinteraksikan dengan Belanja Modal (BM) yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB. Kemudian variabel Tenaga Kerja (TK) dan Investasi (INV) juga memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto

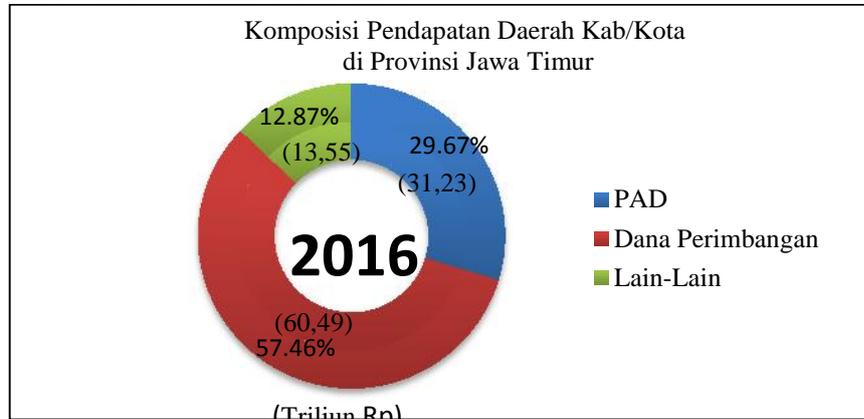
A. PENDAHULUAN

Sentralisasi pemerintahan di Indonesia telah berakhir, digantikan adanya desentralisasi yakni era otonomi daerah. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah terhadap otonomi daerah, sekaligus kemauan politik untuk melakukan reformasi dan demokratisasi sehingga diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah sebagai konsekuensi adanya otonomi daerah. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah sesuai aspirasi, prioritas, dan kebutuhan daerah. Hal ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia. Wujudnya melalui bentuk alokasi belanja daerah yang mampu berdampak langsung dalam menunjang kebutuhan publik. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya berbeda-beda sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan keuangan atau *transfer* ke daerah berupa dana perimbangan.

Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri, 2016) memiliki jumlah Kabupaten dan Kota terbanyak di Indonesia yakni 38 Kabupaten/Kota dengan 29 Kabupaten dan 9 Kota ditambah masing-masing wilayah tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda sehingga mampu merepresentasikan desentralisasi fiskal. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah hal ini ditandai dengan makin kuatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2014) PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah selain dana *transfer* dan lain-lain pendapatan yang sah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah juga akan meningkat pula, sehingga pemerintah

daerah akan lebih berinisiatif untuk menggali potensi daerah dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan Laporan Dirjen Perimbangan Keuangan Provinsi Jawa Timur selama 2016 realisasi pendapatan Kabupaten dan Kota sebagai berikut.

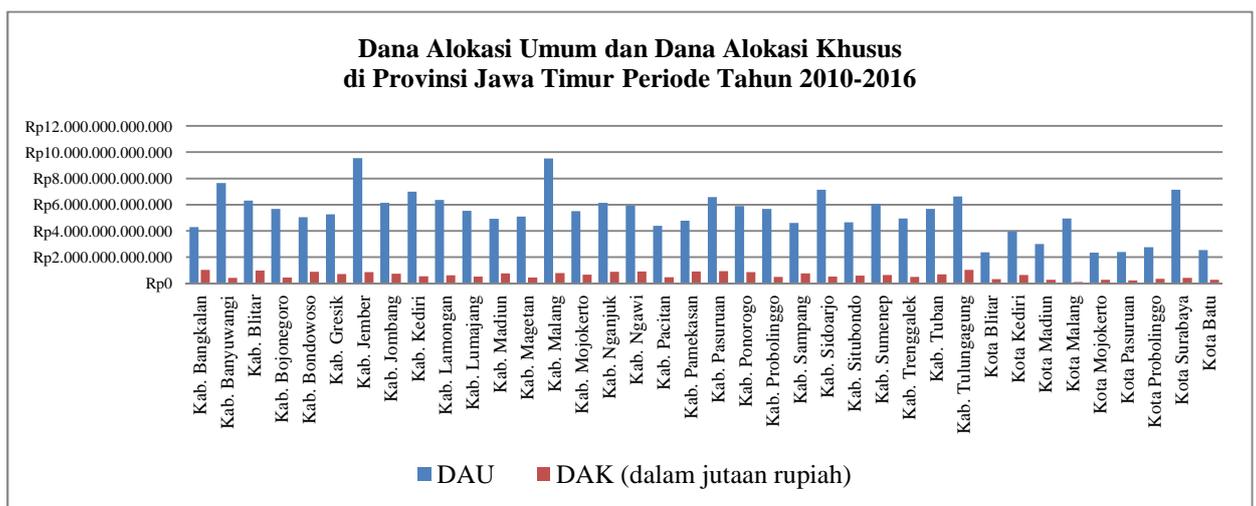
Gambar 1 : **Grafik Realisasi Kumulatif Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**



Sumber : DJPK (diolah, 2018)

Dari gambar 1, dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 31,23 triliun rupiah atau 29,67%, sedangkan dana perimbangan sebesar 60,49 triliun rupiah atau 57,46 % dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 13,55 triliun rupiah atau 12,87%. Dari komposisi pendapatan daerah tersebut dana perimbangan atau *transfer* masih sangat mendominasi hingga diatas 50% yakni 57,46% di dibandingkan dengan PAD sebesar 29,67%. Sehingga masih tingginya ketergantungan pendanaan dari pusat, padahal seharusnya lebih menggali potensi penerimaan daerahnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikasinya jika Pemda banyak mengalokasikan belanja daerahnya kepada belanja modal maka masyarakat akan meningkatkan pembayaran retribusi dan pajak daerah sehingga nantinya akan mendorong PAD yang akan berimbas pada penguatan (*taxing power*) dalam mendukung peningkatan PAD. Dengan banyaknya jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka akan membuat tingkat penerimaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup tinggi untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dijelaskan gambar 2.

Gambar 2: **Total Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016**



Sumber: DJPK (diolah, 2018)

Gambar 2 menjelaskan bahwa tingginya *transfer* pemerintah ke daerah berupa dana perimbangan di era desentralisasi fiskal. Bahwasannya, Kab. Jember menerima DAU tertinggi disusul Kab. Malang, Kab. Banyuwangi, Kab. Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Sedangkan, Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menerima DAU terendah yakni Kota Mojokerto. Perbedaan jumlah DAU yang diberikan kepada tiap daerah dikarenakan perbedaan alokasi dasar ditambah celah fiskal masing-masing daerah. Dana Alokasi Umum (DAU)/*Block Grant* sejatinya merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal (UU No. 33 Tahun 2004). Meskipun begitu urusan pengalokasiannya diserahkan sepenuhnya untuk daerah sesuai dengan sasaran prioritas nasional.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 yaitu Kab. Tulungagung, selanjutnya Kab. Bangkalan, Kab. Blitar, Kab. Pasuruan, dan Kab. Pamekasan, kemudian Kab/Kota yang menerima DAK terendah adalah Kota Malang. Dana Alokasi Khusus (DAK)/*Specific Grant* adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah terpilih untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan wilayah kewenangan daerah tersebut namun selaras prioritas nasional (Kuncoro,2012). Kegiatan khusus tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Tingginya jumlah dana perimbangan khususnya DAU dan DAK seharusnya diimbangi dengan tingginya pengeluaran untuk pelayanan publik seperti sarana dan prasarana infrastruktur yang berguna bagi masyarakat. pengeluaran untuk belanja modal dirasa penting mengingat kebutuhan dan dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan PDRB menurut Prof. Simon Kuznets dalam Jhingan (1992) diartikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi. Prishardoyo (2008) dalam penelitiannya menjelaskan pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB, yakni merupakan satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan. Kinerja perekonomian daerah diukur dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PDRB merupakan indikator yang baik menganalisis kondisi perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2010-2016 menunjukkan peningkatan dan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 : PDRB Atas Harga Konstan 2010 Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2010-2016
Dalam Milyar Rupiah

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	1.147.558,23	1.222.527,92	1.926.694,57	1.373.389,55	1.454.102,11	2.177.120,00
Jawa Timur	1.054.401,77	1.124.464,64	1.192.789,80	1.262.697,06	1.331.418,24	1.855.042,70
Jawa Barat	965.622,06	1.028.409,74	1.093.543,55	1.149.231,43	1.207.001,49	1.652.590,00
Jawa Tengah	656.268,13	691.343,12	726.655,12	764.992,62	806.609,02	1.092.030,90
Banten	290.545,84	310.385,59	331.009,11	349.205,70	365.959,22	516.330,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jawa Timur (diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 1 bahwasannya Pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 fluktuatif. Tetapi, PDRB Provinsi Jawa Timur menunjukkan *record* baik dalam hal PDRB regional yang terus mengalami peningkatan. PDRB Provinsi Jawa Timur juga tertinggi 0,42% di Tahun 2016 dari pertumbuhan nasional sebesar 5,04% . Hingga Tahun 2016 PDRB Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi sebesar 14,76%. Dengan capaian yang tinggi, pemerintah Jawa Timur berkewajiban memastikan bahwa pertumbuhan PDRB yang tinggi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui belanja pemerintah yakni belanja modal. Merujuk pada tujuan desentralisasi fiskal bahwa pentingnya keterkaitan indikator kualitas belanja. Hal tersebut meliputi ketepatan dalam alokasi belanja modal. Sebab, keuangan daerah merupakan

aspek penting mendorong PDRB suatu wilayah. Semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka akan pembangunan daerah tersebut akan semakin maju yang nantinya akan mendorong pertumbuhan PDRB. Tingginya pertumbuhan PDRB tersebut ternyata yang terjadi yakni jika dilihat data alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Timur masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat tabel 2.

Tabel 2 : Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Dalam Jutaan Rupiah

Tahun	Pengeluaran		Alokasi Belanja Modal
	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	
2010	7.826.709.587.519	750.042.129.824	9,58%
2011	10.626.361.387.552	900.462.480.586	8,47%
2012	12.214.783.359.822	1.044.766.715.433	8,55%
2013	16.215.603.000.000	992.142.563.645	6,12%
2014	17.811.135.360.418	1.219.474.411.479	6,85%
2015	23.720.919.803.000	2.565.964.145.679	10,82%
2016	23.050.802.946.617	2.233.574.626.320	9,70%

Sumber : DJPK (diolah, 2018)

Tabel 2 menjelaskan bahwa jika dilihat dari pengeluaran pemerintah daerah alokasi belanja modal Provinsi Jawa Timur terlihat fluktuatif namun anggaran untuk belanja modal mengalami penurunan dan masih jauh dibawah 20%. Alokasi belanja modal yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah dalam perwujudan sarana dan prasarana publik sebagai wujud implementasi desentralisasi fiskal. Padahal belanja modal merupakan belanja daerah yang cukup penting untuk mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut DJPK (2018) bahwa komposisi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 masih didominasi oleh tingginya belanja pegawai 36,36% atau 39,12 triliun rupiah sedangkan belanja modal hanya berkisar 19,09% atau 20,54 triliun rupiah.

Perbedaan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana *transfer* yakni DAU dan DAK antar daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki dampak yang berbeda pula terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sasana (2011) PDRB atas harga konstan berarti nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di berbagai daerah dalam satu periode. Semakin tinggi PDRB maka akan semakin tinggi potensi penerimaan daerah tersebut. Adapun dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap hasil yang beragam terhadap PDRB. Penelitian Alexeev dan Mamedov (2017) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi kualitas kelembagaan dan pertumbuhan PDRB. Battacharyya et al (2017) menekankan manfaat desentralisasi fiskal tergantung penyediaan barang publik seperti belanja modal bagi daerah. Wandira (2013) bahwa PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAK signifikan positif terhadap alokasi belanja modal. Kemudian Zang et al (2017) menjelaskan efek kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh berbeda-beda terhadap PDRB. Adanya perbedaan hasil tersebut sehingga penulis merumuskan pengaruh PAD, DAU, DAK yang diinteraksikan pada alokasi Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbedaan Penelitian ini dengan sebelumnya yakni menggunakan analisis moderasi menggunakan variabel interaksi (*Moderated Reggression Analysis*) yakni Belanja Modal. Selanjutnya pemilihahan Tahun 2010-2016 dikarenakan Badan Pusat Statistika (BPS) menggunakan metode baru dalam perhitungan PDRB atas harga konstan 2010 yakni yang semula hanya mempertimbangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga ditambahkan pengeluaran konsumsi LNPRT dan perubahan inventori yang memperlihatkan pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto. Oleh sebab itu, berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Pendapatan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi

(PAD) yang diterima. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Menurut penelitian Akbar (2012) dalam (Novinato dan Hanafiah, 2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Menurut Sianipar (2011) dalam Novianto dan Hanafiah (2015) variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian dapat mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Dana Perimbangan (*Transfer*)

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan kegiatan pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Tujuan dari *transfer* dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat serta antar pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 159 yang termasuk dalam dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang diberikan pada semua Kabupaten/Kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dengan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya (Kuncoro, 2012). DAU ditentukan atas dasar besar-kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). DAU dihitung dari alokasi dasar ditambah celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah, sedangkan celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan dalam rangka layanan dasar umum yang diukur dari luas penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

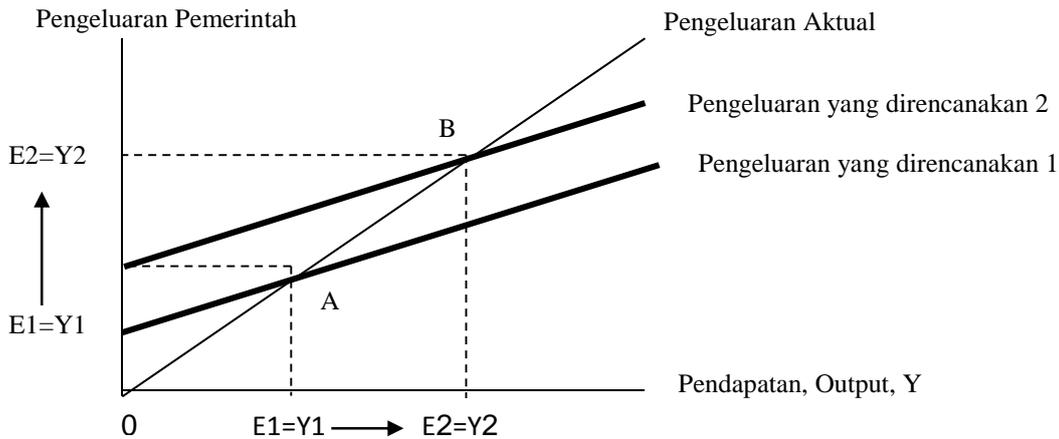
Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus atau *Specific purpose grant* adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah terpilih untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan wilayah kewenangan daerah tersebut namun selaras dengan prioritas nasional. Menurut Kuncoro (2012) DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk kegiatan khusus. Kegiatan khusus tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pada awal berlakunya desentralisasi, transfer DAK diperuntukkan bagi 9 bidang pembangunan prioritas nasional dan sekarang berkembang menjadi 19 bidang. Diantaranya DAK bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, air minum, sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori pengeluaran pemerintah lebih banyak menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB, teori pengeluaran seperti ini lebih banyak dijelaskan oleh *Keynesian cross* yang akan dijelaskan gambar 3.

Gambar 3 : Pengeluaran Pemerintah Pada *Keynesian Cross*



Sumber: Mankiw, 2006

Gambar 3 menjelaskan kenaikan pemerintah atau belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB yang diukur melalui pendapatan dan tingkat *output*. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser ekuilibrium titik A ke titik B yang berarti peningkatan pertumbuhan PDRB (Y). Menurut Mankiw (2006) Keynes dalam bukunya *The General Theory* menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Sehingga kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan.

Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Ayat (1), belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam betuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya. Selanjutnya, jenis – jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Belanja Modal Lainnya
- f. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran investasi melalui belanja modal yang ditujukan untuk pembentukan aset barang dan modal yang diharapkan mampu menimbulkan *multiplier effect* yang lebih besar dan lebih berkelanjutan di masa mendatang sebagai wujud pertumbuhan PDRB daerah. Daripada pengeluaran rutin operasional yang hanya memiliki *multiplier effect* jangka pendek. Bank Dunia pada akhir tahun 2011 dalam Halim (2014) telah mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja berbagai badan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu melaksanakan belanja modal secara bijaksana, maka diharapkan memberikan dampak pula terhadap perekonomian nasional.

Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Sasana (2011) PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi suatu daerah dalam satu periode. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam dan faktor produksi daerah. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah menurut BPS (2017), menggunakan 3 pendekatan yang dipakai yakni:

- a. PDRB menurut pendekatan produksi
Merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada pada jangka waktu tertentu (satu tahun).
- b. PDRB menurut pendekatan pendapatan
Merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa tersebut upah, gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan.
- c. PDRB menurut pendekatan pengeluaran
Merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan akhir yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar di mana dalam perhitungan ini menggunakan tahun dasar 2010. Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2011). Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Analisa Keynes mengenai kebijaksanaan fiskal dapat diterapkan di negara – negara maju. Peranan kebijakan fiskal bagi negara maju adalah untuk menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perekonomian di negara berkembang, peranan kebijaksanaan fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Artinya pertumbuhan PDRB dalam suatu negara ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. PDRB memiliki dampak positif bagi pendapatan nasional, meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan PDRB bergantung pada banyak hal seperti potensi ekonomi, sumber daya alam, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, seberapa besar modal yang dimiliki, seberapa tinggi inovasi teknologi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan efisiensi produksi.

Teori Tenaga Kerja

Mankiw (2006) mengemukakan bahwa kenaikan tenaga kerja atau marginal produk tenaga kerja (MPL) mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang terbentuk dari rata-rata produktivitas tenaga kerja. Faktor pendukung seperti modal akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tenaga kerja yang nantinya berpengaruh pada kenaikan *output* yang dihasilkan, lebih jauh lagi akan mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB. Menurut Solow-Swan, (1956) dalam Ekananda, (2016) menjelaskan bahwa PDRB dipengaruhi oleh peningkatan input (kapital dan tenaga kerja). Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja secara agregat dan sektoral memiliki hubungan yang positif terhadap PDRB.

Teori Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi sesuai dengan Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan manfaat lainnya yang meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2014). Keputusan investasi menurut Jhingan (1992) tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada kekuatan pasar. Ada berbagai alasan mengapa mekanisme harga tidak berfungsi sebagaimana mestinya di negara berkembang. Satu di antaranya adalah tidak elastisitasnya penawaran produk. Bila permintaan produk meningkat, penawarannya tidak cepat menanggapi. Alasannya adalah kecilnya pasar, kurangnya sarana angkutan dan transportasi baik penyediaan infrastruktur publik, kurangnya modal, manajemen dan tenaga kerja. Oleh karenanya investasi membawa pengaruh percepatan perekonomian yang berimplikasi pada pertumbuhan PDRB.

Investasi fisik daerah yakni Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut BPS (2017) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMBT mencakup bangunan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Investasi tersebut dapat melihat

akumulasi modal dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Berdasarkan teori Harrod-Domar, Ram dan Zhang (2002) dalam Ekananda, (2016) bahwa investasi diperlukan sebagai tambahan stok modal dalam menumbuhkan perekonomian. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung, peralatan, dan material yang digunakan untuk kegiatan yang produktif. Investasi memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan PDRB.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan. Maka, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- H2 : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- H3 : Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- H4 : Diduga Alokasi Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- H5 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh interaksi dengan belanja modal terhadap PDRB .

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, guna mencapai tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Menurut Sarwono (2013) dalam penelitian kuantitatif persoalan yang akan dikaji dirumuskan dalam bentuk variabel, kemudian peneliti mencoba untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam atau sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian kuantitatif bersifat empiris dan objektif, penelitian kuantitatif mengedepankan konsep parsimoni, yaitu suatu konsep yang menyebutkan bahwa suatu data tertentu harus diinterpretasi secara yang paling sederhana, singkat dan jelas, serta tidak diperlukan keterangan yang rumit. Penelitian kuantitatif dapat dimaknai sebagai metode penelitian yang menggunakan logika deduktif yaitu dalam sebuah penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan dengan pencarian fakta. Cara analisisnya dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan secara khusus.

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah Kabupaten dan Kota tertinggi di Indonesia (Kemendagri, 2016) yakni 38 Kabupaten/Kota dengan kondisi geografis yang berbeda – beda satu sama lainnya yang mampu merepresentasikan desentralisasi fiskal. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki *record* yang baik karena selalu meningkat selama periode Tahun 2010-2016. Hingga Tahun 2016 kontribusi PDRB Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi sebesar 14,76 persen pada pertumbuhan nasional. Pemilihan periode Tahun 2010-2016 dikarenakan pertimbangan bahwa pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan melihat perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur selama 7 tahun. Tahun 2010-2016 dalam PDRB atas harga konstan 2010 pada Badan Pusat Statistika (BPS) menggunakan metode baru dalam perhitungannya yakni yang semula hanya pengeluaran konsumsi rumah tangga, ditambahkan pengeluaran konsumsi LNPRT dan perubahan inventori serta dengan memperhatikan pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data sekunder internal lembaga terkait kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah terpublikasi yakni bersumber dari laporan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal (BM) dari tahun 2010-2016. Selanjutnya data juga diperoleh dari laporan Badan

Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur yaitu data dinamis Provinsi Jawa Timur di internet mengenai data PDRB, tenaga kerja, dan investasi Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.

Model Penelitian ini menggunakan regresi data panel menggunakan variabel interaksi. Kemudian untuk menyamakan pengukuran variabel maka digunakan persamaan model logaritma natural (*doubel log*). Persamaan ini dibentuk agar linear dan data terdistribusi secara normal. Di mana semua variabel independen dan dependen ditransformasikan dalam logaritma natural (ln) sehingga parameter yang dihasilkan akan konsisten dan efisien serta dapat diaplikasikan ke teori-teori ekonomi (Ekananda, 2015). Hal ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi Belanja Modal (BM) sebagai variabel interaksi. Variabel interaksi dimaksudkan sebagai dampak variabel independen terhadap dependen dipengaruhi oleh perilaku variabel lain. Moderasi dengan adanya variabel interaksi yakni adanya interaksi antar variabel. Metode mendapatkan pengaruh dari variabel moderasi adalah menggunakan perkalian antara variabel yang ditinjau dan variabel yang diduga dapat memperlemah dan memperkuat (Ekananda, 2016). Variabel interaksi/mediasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya ditambahkan Tenaga Kerja (TK) dan Investasi (INV) sebagai variabel kontrol penelitian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur pada 38 Kabupaten/Kota tahun 2010-2016. Model regresi linear tersebut adalah:

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + \beta_4 \ln BM_{it} + \beta_5 (\ln BM_{it} \times \ln PAD_{it}) + \beta_6 (\ln BM_{it} \times \ln DAU_{it}) + \beta_7 (\ln BM_{it} \times \ln DAK_{it}) + \beta_8 TK_5 + \beta_9 INV_6 + \varepsilon_{it}$$

Metode analisis data yakni analisis deskriptif untuk memberikan gambaran data secara deskriptif. Nilai-nilai umum dalam statistik deskriptif diantaranya ialah rata-rata, simpangan baku, nilai minimal, maksimal, jumlah (sum). Nilai-nilai ini memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti sehingga menjelaskan karakteristik data (Sarwono, 2016). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Kemudian melakukan uji hipotesis, uji simultan (uji F), uji parameter individual (uji t) dan melihat Koefisien Determinasi (R^2).

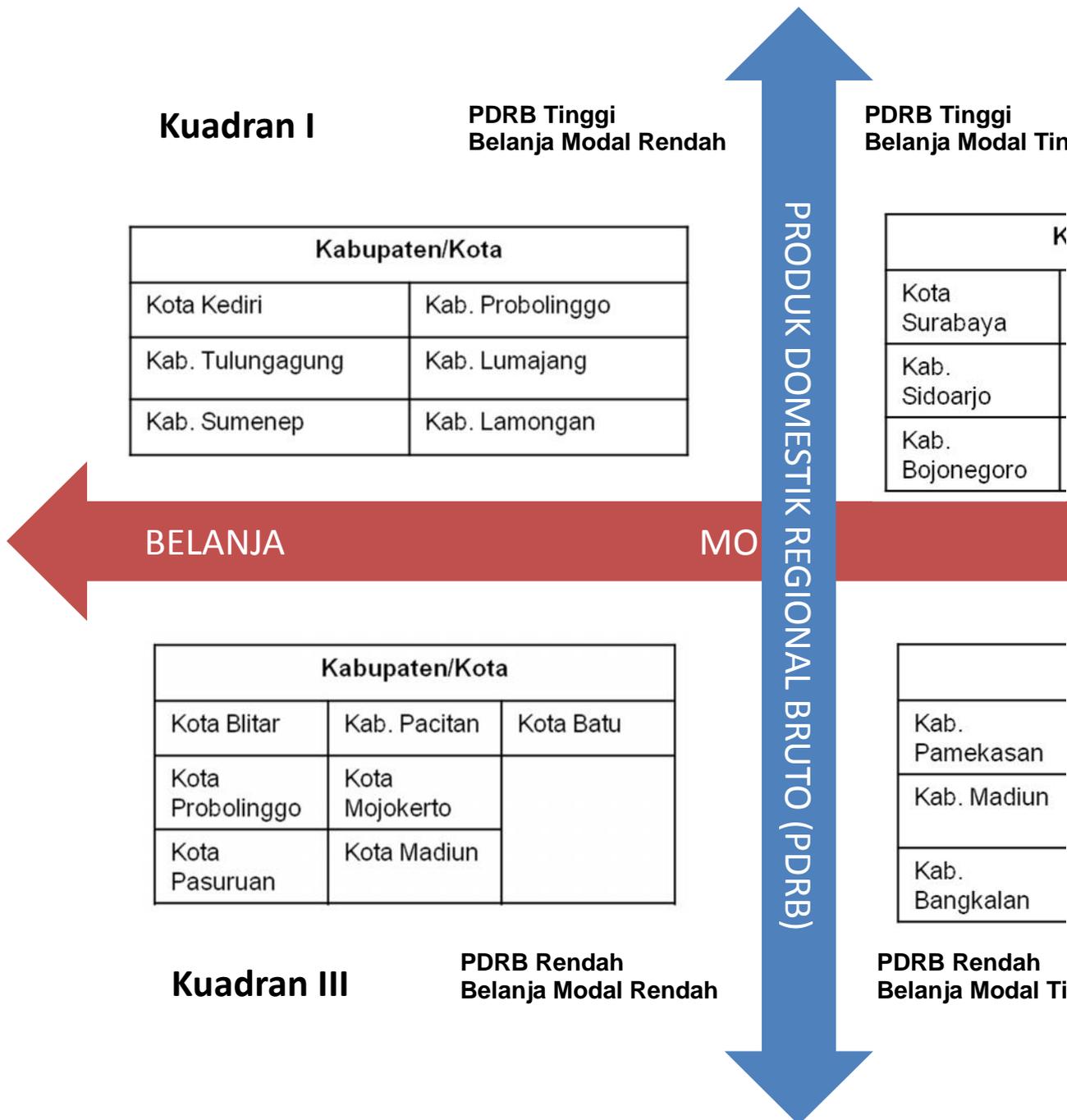
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lingkup Penelitian

Kinerja pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas tentu menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia yang memiliki bentuk pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pokok – pokok pemerintahan di daerah menyebutkan secara tidak langsung Jawa Timur merupakan daerah otonom. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan PDRB tertinggi antar provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur merupakan kontributor terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia. Terakhir ditahun 2016 sebesar 5,55% di mana PDRB tersebut diatas pertumbuhan nasional sebesar 5,02% atau 0,53 poin dengan begitu Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi PDRB terhadap nasional sebesar 14,44%. Namun rata-rata alokasi belanja pemerintah khususnya belanja modal masih rendah yakni di bawah 20%.

Belanja modal dijadikan salah satu indikator dalam peningkatan pertumbuhan PDRB berdasarkan teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah bahwa belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang berguna bagi Produk Domestik Regional Bruto/PDRB. Hal tersebut dapat digambarkan pada kuadran hubungan belanja modal dan PDRB di bawah ini:

Gambar 4 : **Kuadran Hubungan Belanja Modal dengan Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016**



Sumber : DJPK dan BPS (diolah, 2018)

Berdasarkan gambar 4 menjelaskan pada Kuadran I yakni Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki PDRB tinggi namun alokasi belanja modalnya rendah yakni Kota Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Tulungagung, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang, dan Kab. Lamongan. Ini terjadi bisa saja dikarenakan fokus alokasi pada peningkatan belanja operasional dibandingkan dengan kebijakan pada alokasi belanja modal masing-masing daerah. Atau sebaliknya, yang mempengaruhi PDRB bukan hanya berasal dari belanja modal.

Pada Kuadran II menjelaskan hubungan positif dimana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 yang memiliki tingkat PDRB tinggi dan belanja modal yang tinggi pula

yakni Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Pasuruan yang merupakan daerah kawasan industri. Dan jika dilihat kembali daerah-daerah tersebut memang memiliki PAD yang tinggi di Provinsi Jawa Timur dan penerimaan dana transfer baik DAU dan DAK yang tinggi. Kemudian daerah pertanian seperti Kab. Bojonegoro dan Kab. Banyuwangi yang juga memiliki tingkat alokasi belanja modal tinggi dan tingkat PDRB yang tinggi. Jika dilihat dari dokumen RPJM kabupaten tersebut memang dari segi fiskal pemerintah daerah sedang membangun daerahnya dengan membangun sarana dan prasarana infrastruktur fisik demi meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pada Kuadran III menjelaskan hubungan tingkat PDRB rendah dengan alokasi belanja modal yang rendah pula di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 yakni pada Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Pacitan, Kota Mojokerto, Kota Madiun dan Kota Batu. Seperti gambar 4.2 tentang kondisi PAD bahwa Kabupaten/Kota pada kuadran III ini memang memiliki PAD yang rendah sehingga alokasi pada belanja modalnya juga rendah. Sehingga dengan alokasi belanja modal yang rendah tersebut berdampak pada PDRB di daerah tersebut.

Pada kuadran IV menjelaskan hubungan PDRB yang rendah dan belanja modal yang tinggi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 yakni pada Kab. Pamekasan, Kab. Madiun, Kab. Bangkalan, Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Situbondo. Dari Kabupaten/Kota ini memiliki alokasi terhadap belanja modal yang tinggi namun tingkat PDRB yang rendah. Hal ini dikarenakan fokus pemerintah pusat memang untuk lebih mendorong alokasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan PDRB di daerah tersebut.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi Belanja Modal (BM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah:

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan. Statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan dalam permodelan penelitian ini dijelaskan tabel 3.

Tabel 3: Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	LN_PDRB	LN_PAD	LN_DAU	LN_DAK	LN_BM	LN_TK	LN_INV
Mean	9.821881	14.82824	13.18202	11.27455	0.441666	12.89164	14.53535
Median	9.731564	16.62117	13.18203	11.27465	0.441755	13.08857	14.72537
Maximum	12.74738	0.957497	0.246493	0.391111	0.767091	14.15651	15.36201
Minimum	7.956477	0.473205	0.117543	0.157815	0.116073	10.94793	12.51706
Std. Dev.	0.959520	0.185215	0.064471	0.116027	0.325851	0.800735	0.691831
Skewness	0.576137	0.567032	0.89E-07	0.24E-05	0.55E-07	0.002367	0.956546
Kurtosis	3.192159	3.443876	3.000005	3.000073	3.000001	3.180980	3.112142
Jarque-Bera	15.12501	41.09279	44.33311	44.33011	44.33329	44.90652	40.70354
Probability	0.057520	0.793479	2.361500	2.365042	0.361288	0.346344	0.449901
Sum	2612.620	3944.312	3506.417	2999.032	3309.483	3429.176	3866.403
Sum Sq. Dev.	243.9799	2688.582	1.101490	3.567489	28.13735	169.9118	126.8371
Observations	266	266	266	266	266	266	266

Sumber : Output Eviews 9 (diolah,2018)

Dengan melihat probabilitas Jarque-Bera pada tabel 3 dan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0.05$), residual terdistribusi normal jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 0.05. Dari pengujian terlihat bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (BM), Tenaga Kerja (TK) dan Investasi (INV) memiliki probabilitas lebih besar dari 0.05 sehingga data terdistribusi normal. Karena penelitian ini menggunakan data panel, maka untuk estimasi (OLS dan GLS) tidak memerlukan uji normalitas. Menurut Ekananda (2016) dalam data panel yakni estimator FGLS tidak memerlukan pengujian asumsi klasik, tetapi estimator telah BLUE (OLS). Estimator FGLS adalah persamaan yang tidak bias dan konsisten. Sebab, mengasumsikan adanya kondisi heterogenitas antar persamaan dan memperhatikan adanya struktur residu yang berbeda antar persamaan, di mana setiap persamaan diasumsikan homoskedastik dan terdistribusi normal.

Pengujian Kesesuaian Model

Hasil pengujian pada kesesuaian model yang paling tepat menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Uji Chow (*Chow Test*)

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DAERAH
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.360765	(37,219)	0.0000
Cross-section Chi-square	340.373336	37	0.0000

Sumber : Output Eviews 9 (diolah,2018)

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan nilai probabilitas (*p-value*) dari nilai statistik *cross-section F* dan *cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 berarti menolak H_0 yakni menolak *Common Effect Model*. Kesimpulannya menerima H_1 yaitu memilih model *Fixed Effect Model*.

Tabel 5: Hasil Uji Hausman (*Hausman Test*)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: DAERAH
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.066740	9	0.0768

Sumber : Output Eviews 9 (diolah,2018)

Berdasarkan tabel 5 menjelaskan nilai probabilitas cross section random adalah 0,0768 lebih besar dari 0,05 sehingga menolak H_1 yakni *Fixed Effect Model* dan menerima H_0 yakni memilih *Random Effect Model*.

Tabel 6: Hasil Uji Lagrange Multiplier (*Lagrange Multiplier Test*)

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 03/23/18 Time: 14:26

Sample: 2010 2016

Total panel observations: 266

Probability in ()

Null (no rand. Cross-effect)	section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	

Breusch-Pagan	718.5647	0.048047	718.6128
	(0.0000)	(0.8265)	(0.0000)
Honda	26.80606	-0.219196	18.79975
	(0.0000)	(0.5868)	(0.0000)
King-Wu	26.80606	-0.219196	9.809905
	(0.0000)	(0.5868)	(0.0000)
GHM	--	--	718.5647
	--	--	(0.0000)

Sumber : Output Eviews 9 (diolah,2018)

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan nilai p-value sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 sehingga menolak H0 yakni *Fixed Effect Model*. Kesimpulannya menerima H1 yakni *Random Effect Model*. Ringkasan hasil regresi data panel memilih model terbaik yakni *Random Effect Model* (REM) dari pengaruh PAD, DAU, dan DAK yang diinteraksikan dengan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan variabel interaksi melalui metode *Random Effect Model* (REM) pada tabel 7.

Tabel 7 : Ringkasan Hasil Moderasi Menggunakan Variabel Interaksi (*Moderated Regression Analysis*)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Probability</i>
C	6.730009	1.183477	0.0000
lnPAD?	0.289230	0.957748	0.0391
lnDAU?	-0.757289	-1.281801	0.0511
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Probability</i>
lnDAK?	1.100362	1.257270	0.0248
lnBM?	0.154163	0.338772	0.0000
Interaksi (lnBMPAD?)	0.046492	0.031878	0.0000
Interaksi (lnBMDAU?)	0.472700	0.953324	0.0413
Interaksi (lnBMDAK?)	0.006988	0.186313	0.0000
lnTK?	0.694130	1.728130	0.0052
lnINV?	0.304621	0.900652	0.0000
<i>Prob (F-statistik)</i>		0.000000	
<i>Overall (Adjusted R²)</i>		0.726001	

Sumber : Output Eviews 9 (diolah, 2018)

Tabel 7 menjelaskan jumlah tenaga kerja memiliki nilai koefisien terbesar yaitu 0.694130. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh paling besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil pengujian variabel interaksi tersebut dijelaskan bahwa variabel belanja modal memoderasi PAD, DAU, dan DAK terhadap PDRB.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil estimasi data panel dengan metode REM yang tampak pada *output Eviews 9* pada penelitian ini, dapat dilakukan uji signifikansi parsial (uji t) dengan melihat probabilitas t-statistik masing-masing variabel independen.

Hasil Uji t

$$\ln\text{PDRB}_{it} = 6.730009 + 0.289230\ln\text{PAD}_{i,t-1} - 0.757289\ln\text{DAU}_{i,t-1} + 1.100362\ln\text{DAK}_{i,t-1} + 0.154163\ln\text{BM}_{i,t-1} + 0.046492\ln\text{BMPAD}_{i,t-1} + 0.472700\ln\text{BMDAU}_{i,t-1} + 0.006988\ln\text{BMDAK}_{i,t-1} + 0.694130\ln\text{TK}_{i,t-1} + 0.304621\ln\text{INV}_{i,t-1}$$

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel dependen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas nilai F-statistik pada model. Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), maka semua variabel berpengaruh signifikan apabila probabilitas nilai F-statistik lebih kecil dari 0.05 ($p\text{-value} < 0.05$). Dari hasil olah data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM), terlihat bahwa probabilitas nilai F-statistik adalah 0.000000, yang berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($p\text{-value} < 0.05$). Dengan demikian, disimpulkan bahwa semua variabel secara bersama-sama signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Belanja Modal (BM), variabel interaksi yakni BMPAD, BMDAU, BMDAK dan variabel kontrol penelitian yakni Tenaga Kerja (TK) dan Investasi (INV) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terlihat bahwa variabel yang memiliki nilai koefisien terbesar adalah Tenaga Kerja (TK) sebesar 0.694130 variabel interaksi Dana Alokasi Umum (BMDAU) sebesar 0.47700 dan Investasi (INV) sebesar 0.304621. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh paling besar terhadap PDRB, kemudian disusul dengan variabel Dana Alokasi Umum yang diinteraksikan melalui alokasi belanja modal yang memiliki pengaruh terbesar kedua dan terakhir yakni variabel investasi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Adjusted R-squared atau koefisien determinasi (R^2) model bernilai 0.749420. Hal ini berarti 74,94% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dari variabel independen. Sementara sisanya 25,06% dijelaskan faktor lain diluar model.

Pembahasan

Analisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menunjukkan pengaruh langsung signifikan sebesar 0.0391 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis di terima. PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan arah hubungan positif. Hubungan yang positif bermakna bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pengaruhnya terhadap PDRB. Berdasarkan tujuan utama desentralisasi fiskal yakni dengan terciptanya kemandirian daerah atau basis fiskal daerah melalui PAD yang kuat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah khususnya PAD. Dengan kuatnya PAD diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan pengeluarannya secara optimal dan efisien kepada belanja publik yakni salah satunya belanja modal. Kebijakan fiskal terutama dalam bentuk belanja modal mampu mendorong peningkatan PDRB di daerah. Sehingga nantinya mampu dijadikan patokan untuk penganggaran/alokasi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni Zang et all (2017) bahwa desentralisasi fiskal dengan adanya wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri sehingga daerah mampu untuk menggali sumber penerimaannya berupa Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mencerminkan kondisi ketergantungan daerah terhadap bantuan/*transfer* pemerintah pusat, sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Jika tingkat ketergantungan daerah tinggi, maka otomatis daerah tersebut tingkat kemandiriannya rendah. Tingginya tingkat ketergantungan atau kemandirian diharapkan tetap menjadikan alokasi pada belanja modal sebagai prioritas dalam pembangunan di daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan sebesar 0,0511 yaitu lebih kecil 0,05 sehingga hipotesis diterima. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan terhadap PDRB dengan arah hubungan negatif. Hubungan negatif berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan semakin rendah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten/Kota cukup besar, namun dalam penggunaannya belum optimal termasuk dalam alokasi belanja modal yang belum menjadi prioritas. Dengan kata lain, sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja pegawai, sehingga alokasi belanja modal relatif kecil dan dampaknya terhadap PDRB juga sangat rendah atau bisa dikatakan tidak mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah.
- Ini dikarenakan alokasi belanja modal yang relatif kecil dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut belum memiliki pengaruh yang besar untuk mendorong PDRB di Provinsi Jawa Timur. Salah satu faktornya juga karena alokasi belanja modal yang relatif kecil sehingga belum mampu mendorong PDRB secara keseluruhan. Rendahnya alokasi belanja modal ini juga disebabkan karena upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah kemudian dari segi fiskal, dapat dilihat menurut Kajian Ekonomi dan Regional Keuangan Daerah BI (2016) menjelaskan beberapa fokus prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan yang dijabarkan dalam program unggulan diantaranya sebagai berikut:
 - Penguatan Kemiskinan melalui program “jalan lain menuju mandiri dan sejahtera” (JALINMANTRA)
 - Perluasan kesempatan belajar di SMK
 - BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SLTA
 - BOSDA MADIN (bantuan operasional sekolah untuk madrasah dan diniyah)
 - Penguatan dan Pengembangan Taman Posyandu
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Adapun proyek pembangunan besar yang menyebabkan penurunan alokasi belanja modal yakni pembangunan beberapa waduk-waduk besar di Jawa Timur sudah diselesaikan, serta waduk-waduk skala sedang sedang mulai dibangun. Dengan demikian kebutuhan anggaran untuk belanja jalan, irigasi, dan jaringan relatif menurun. Meskipun begitu belanja modal tanah mengalami kenaikan terkait dimulainya pembangunan infrastruktur di Jawa Timur Tahun 2016 terkait kebutuhan akan pembebasan lahan sehingga dibutuhkan anggaran lebih untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini sama seperti penelitian Setiyawati dan Hamzah (2007) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap PDRB hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum mampu mendorong pertumbuhan PDRB secara langsung di daerah.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan hasil pengujian DAK menunjukkan pengaruh signifikan sebesar 0,0248 yaitu lebih kecil 0,05 sehingga hipotesis diterima. Variabel DAK signifikan secara langsung terhadap PDRB dengan arah hubungan positif. Arah hubungan positif berarti semakin besar DAK maka akan semakin besar juga pengaruhnya terhadap PDRB atau Dana Alokasi Khusus/DAK memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan UU no. 33 Tahun 2004 bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana *transfer* dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus seperti memprioritaskan kegiatan pembangunan/belanja modal, pengadaan, dan perbaikan sarana fisik untuk menunjang pelayanan fisik masyarakat di daerah. Bahkan pada Tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan DAK menjadi DAK fisik dan non fisik, di mana DAK fisik digunakan untuk mendukung kebutuhan khusus daerah (dukungan belanja modal), bidang DAK fisik untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang meliputi dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Sedangkan DAK non fisik untuk belanja operasional. Semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan PDRB demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sama dengan penelitian Alexeev dan Mamedov (2017) bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari pengeluaran pemerintah ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mempengaruhi kualitas kelembagaan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni Setiyawati dan Hamzah (2007) bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong PDRB sebab karakteristik

DAK yang dipergunakan untuk daerah cukup spesifik atau mendanai kebutuhan khusus sesuai prioritas nasional.

Variabel Belanja Modal (BM)

Dari hasil pengujian menunjukkan variabel Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,0000 yaitu kurang dari 0,05 berarti hipotesis diterima. Variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan secara langsung terhadap PDRB dengan arah positif. Arah positif berarti semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Mengacu pada teori investasi, penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan modal dan yang bersumber dari masyarakat berupa investasi baik yang bersumber dari swasta/ pihak asing atau pemerintah berupa belanja modal untuk kepentingan pengadaan alat-alat atau fasilitas seperti lahan, jalan, mesin dan lainnya. Hal ini juga bersesuaian dengan tahapan perkembangan ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Rostow dan Musgrave. Namun yang perlu digaris bawahi belanja modal yang dapat mempengaruhi naik/turunnya PDRB adalah belanja modal atau belanja pembangunan infrastruktur yang dapat menyentuh langsung pada perekonomian masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan menurut Arsa dan Setiawina (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif pada PDRB. Hal ini dikarenakan belanja modal memiliki efek multiplier untuk mendorong sarana dan prasarana di daerah yang nantinya mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

Variabel Belanja Modal yang diinteraksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (BMPAD)

Berdasarkan hasil regresi dijelaskan bahwa interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,0000 yaitu kurang dari 0,05 berarti hipotesis diterima. Interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti jika semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar juga pengaruhnya pada alokasi pada Belanja Modal (BM). Pengujian efek interaksi ini menjelaskan bahwa adanya interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan alokasi pada Belanja Modal (BM). Kemudian dari variabel yang diinteraksikan menjelaskan bahwa belanja modal memoderasi pengaruh PAD terhadap PDRB. Dengan demikian, memperlihatkan pentingnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada alokasi belanja modal demi mendorong PDRB di daerah. Sebab, Belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada pelayanan publik baik sarana dan prasarana fisik yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Melalui belanja modal maka akan mendukung pula PDRB di daerah. Untuk selanjutnya, alokasi belanja terutama pada alokasi belanja modal dapat direncanakan sesuai prioritas pembangunan di daerah. Hal ini sama dengan penelitian Sianipar (2011) dalam Novianto dan Hanafiah (2015) variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin tinggi PAD maka akan meningkatkan belanja modal. Penelitian ini juga sama dengan penelitian Nuarisa (2013) bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal dikarenakan PAD belum optimal dalam pengalokasiannya pada prioritas belanja daerahnya terutama belanja modal.

Variabel Belanja Modal yang diinteraksikan dengan Dana Alokasi Umum (BMDAU)

Berdasarkan hasil regresi dijelaskan bahwa interaksi antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,0413 yaitu kurang dari 0,05 berarti hipotesis diterima. Interaksi antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti jika semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) maka semakin besar juga alokasi pada Belanja Modal (BM). Pengujian efek interaksi ini menjelaskan bahwa adanya interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan alokasi pada Belanja Modal (BM). Kemudian dari variabel yang diinteraksikan menjelaskan bahwa belanja modal memoderasi DAU terhadap PDRB. Dengan demikian, memperlihatkan pentingnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada alokasi belanja modal demi mendorong PDRB di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sangat penting mengingat di era desentralisasi fiskal, DAU diberikan pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Sehingga peruntukannya menjadi tanggung jawab daerah dalam mengelolanya terutama dalam alokasi belanja daerah. Belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran

pemerintah yang ditujukan pada pelayanan publik baik sarana dan prasarana fisik yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Melalui belanja modal maka akan mendukung pula PDRB di daerah. Untuk selanjutnya, alokasi belanja terutama pada alokasi belanja modal dapat direncanakan sesuai prioritas pembangunan di daerah. Hal ini sama dengan penelitian Nuarisa (2013) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Susanti dan Fahlevi (2016) juga meneliti bahwa DAU berpengaruh positif pada belanja modal.

Variabel Belanja Modal yang diinteraksikan dengan Dana Alokasi Khusus (BMDAK)

Berdasarkan hasil regresi dijelaskan bahwa interaksi antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,0000 yaitu kurang dari 0,05 berarti hipotesis diterima. Interaksi antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti jika semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) maka semakin besar alokasi pada Belanja Modal (BM). Pengujian efek interaksi ini menjelaskan bahwa adanya interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan alokasi pada Belanja Modal (BM). Kemudian dari variabel yang diinteraksikan menjelaskan bahwa belanja modal memoderasi DAK terhadap PDRB. Dengan demikian, memperlihatkan pentingnya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi belanja modal demi mendorong PDRB di daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat penting berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, bahwa DAK bersifat *Specific purpose grant* yakni dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah terpilih untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus. Kemudian pemerintah juga mulai memfokuskan bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi DAK Fisik dan DAK non Fisik di mana untuk memperkuat desentralisasi fiskal maka kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2016-2017 dibagi menjadi 2 yakni DAK fisik dan Non fisik. Di mana DAK fisik digunakan untuk mendanai kebutuhan khusus daerah (dukungan belanja modal) sedangkan DAK non fisik digunakan untuk kebutuhan belanja operasional. Hal ini merujuk Peraturan Menteri Keuangan PMK 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan *transfer* ke daerah dan dana desa. Sehingga peruntukannya menjadi tanggung jawab daerah dalam mengelolanya terutama dalam alokasi belanja daerah. Melalui belanja modal maka akan mendukung pula PDRB di daerah. Untuk selanjutnya, alokasi belanja terutama pada alokasi belanja modal dapat direncanakan sesuai prioritas pembangunan di daerah. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Begitupun Nuarisa (2013) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel Tenaga Kerja (TK)

Variabel Tenaga Kerja (TK) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini di mana variabel tenaga kerja memang menjadi salah satu faktor untuk mendorong PDRB. Mankiw (2006) mengemukakan bahwa marginal produk tenaga kerja mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel tenaga kerja dilihat dari jumlah angkatan kerja penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja. Modal akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tenaga kerja yang nantinya berpengaruh pada kenaikan *output* yang dihasilkan, lebih jauh lagi akan mempengaruhi PDRB. Dalam pengujian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja langsung berpengaruh signifikan sebesar 0,0052 yaitu kurang dari 0,05 berarti hipotesis di terima. Tenaga Kerja (TK) signifikan terhadap PDRB. Arah hubungan menunjukkan arah positif di mana jika tenaga kerja meningkat maka PDRB juga meningkat. Solow – Swan (1956) dalam Ekananda (2016) menjelaskan bahwa PDRB dipengaruhi oleh peningkatan input (kapital dan tenaga kerja). Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja secara agregat dan sektoral memiliki hubungan yang positif terhadap PDRB.

Variabel Investasi (INV)

Variabel Investasi (INV) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini di mana investasi berdasarkan teori dalam M.L Jhingan (1992) investasi membawa pengaruh dalam percepatan perekonomian yang berimplikasi untuk meningkatkan PDRB. Investasi merupakan usaha untuk menggerakkan perekonomian perekonomian melalui pembentukan modal. Dalam pengujian dijelaskan bahwa variabel investasi (INV) secara langsung memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,0000 yaitu kurang dari 0,05 berarti hipotesis diterima. Variabel Investasi (INV) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Dengan arah positif yang berarti

setiap kenaikan investasi akan menaikkan pula PDRB. Sehingga kebijakan fiskal harus mendorong arus investasi yang diinginkan masyarakat. Seperti, di bidang transportasi, pelayanan publik, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja, serta bidang kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan teori Harrod – Domar, Ram dan Zhang (2002) dalam Ekananda (2016) bahwa investasi diperlukan sebagai tambahan stok modal dalam menumbuhkan perekonomian. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung, peralatan, dan material yang digunakan untuk kegiatan produktif sehingga memiliki hubungan positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) studi pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PDRB dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK yang sudah di interaksikan dengan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB. Pengujian ini menunjukkan bahwa belanja modal memoderasi hubungan PAD, DAU, DAK terhadap PDRB. Sehingga bisa dijelaskan bahwa ada interaksi antara PAD, DAU, dan DAK pada alokasi Belanja Modal. Selain itu, variabel kontrol penelitian yakni Tenaga Kerja (TK) dan Investasi (INV) juga memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbeda dengan dampak langsung PAD, DAU, DAK terhadap PDRB, di mana DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB dengan arah hubungan negatif. DAU yang memiliki hubungan negatif ini dikarenakan penggunaan yang belum optimal oleh pemerintah daerah dalam alokasi pada belanja modal. Menurut DJPK, rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 masih di bawah 20 persen dan mengalami penurunan di Tahun 2016 yakni hanya berkisar 14 persen. Hal ini berarti belanja modal masih belum memiliki pengaruh yang besar untuk mendorong pertumbuhan PDRB. Alokasi belanja modal yang relatif kecil, disebabkan upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah dan di segi fiskal program-program yang masih berfokus pada pendidikan dan peningkatan kesehatan. Serta masih ada proyek pembangunan besar yang menyebabkan belanja modal menurun.

Saran

Dari hasil, pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya pada penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan saran terkait penelitian yang telah dilakukan, diantaranya adalah Pengaruh PAD, DAU, DAK pada penelitian ini terhadap PDRB lebih disebabkan oleh fleksibilitas pendapatan daerah tersebut dalam pemanfaatannya yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah di era desentralisasi fiskal. Melalui keleluasaan tersebut pemerintah daerah dapat menggunakan dananya baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dari dana *transfer* (DAU dan DAK) tersebut sesuai agenda ekonominya yakni berupa pembangunan sarana dan prasarana dasar yang berperan dalam mendorong pertumbuhan PDRB daerah. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data penelitian pada provinsi lain yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitiannya seperti Provinsi – provinsi yang berada di luar Pulau Jawa. Selain itu, mencoba alternatif lain dengan memperbesar ruang lingkup data sekunder, sudut pandang dan instrumen yang berbeda sehingga diharapkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexeev dan Mamedov. 2017. *Factors Determinizing Intra-regional Fiscal Decentralization in Russia and the US*. Russian Journal of Economics. Available Online at <http://www.sciencedirect.com/>. Published by Voprosy Ekonomiki N.P. 3: 425-444. Diakses Pada 21 Oktober 2017.
- Arsa dan Setiawina. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan pada alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 sd 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 20 No. 2. Hal 104-112.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2016*. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Jawa Timur.
- Bachtiar, Ali Phipilip. 2013. *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terdidik, Tenaga Kerja Tidak Terdidik, dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah terhadap Petumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: BARLINGMASCAKEB, SUBOSUKOWONOSRATEN, DAN KEDUNGSEPUR)*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Diponegoro.
- Bank Indonesia. 2016. *Kajian Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur November 2016* dipublikasi online (<http://www.bi.go.id/id/Publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/>). Diakses pada 21 Desember 2017.
- Bhattacharyya, Conradie dan Arezki. 2017. *Resource Discovery and The Politics of Fiscal Decentralization*. Journal of Comparative Economics (<http://www.elsevier.com/locate/jce/>). Available at Science Direct. 45: 366-382. Diakses pada 13 Oktober 2017.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Permendagri yang diakses melalui <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen/>*. Diakses Pada 14 Oktober 2017.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. 2018. *Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Jakarta.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel Teori Lengkap dan Pembahasan Menyeluruh Bagi Penelitian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Fatihudin, Didin. 2012. *Kontribusi Private Investment dan Belanja Modal Pemerintah terhadap Nilai Tambah Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kab/Kota Hight Economics di Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya, Kota Kediri, Kab. Sidoarjo dan Kab Gresik)*. *Jurnal Akuntansi* (<http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akrl/>). Vol 4 No.1 Hal: 90-104. Diakses Pada 14 Oktober 2017.
- Gujarati, Damodar N. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 1, Edisi 5*. The mc Graw-Hill. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2, Edisi 5*. The Mc Graw-Hill. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hadi, Sasana. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18. Hal. 46-45. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mankiw, N Gregory. 2006. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Novianto dan Hanafiah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 4. No. 1. Hal: 1-22.
- Nuarisa, Sheila A. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal* (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index-php/aaaj>). Vol. 1. No. 3 Hal: 90-95. Diakses Pada 16 Oktober 2017.
- Nugroho dan Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. *Diponegoro Journal of Accounting* (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>). Vol. 1. No. 2. Hal:1-14. Diakses Pada 16 Oktober 2017.
- Prishardoyo, Bambang. 2008. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Negeri Semarang*. Vol. 1 No. 1. Hal:1-9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 dan 70 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2016. *Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis Dengan Eviews*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sasana, Hadi. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). UNDIP: Vol. 18 No. 1 Hal. 46-58.
- Setiyawati dan Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 4. No.2. Hal: 211-288.
- Sun'an dan Senuk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Susanti dan Fahlevi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1 No. 1 Hal: 183-191.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE-UI.
- Sidik, Machfud, Robert dan Simanjuntak. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Todaro, Michael. 2011. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Dana Perimbangan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyudi, Tri Setyo. 2016. *Konsep Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Wandira, Arbie G. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal* (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/>). Vol. 2. No. 1. Hal: 45-51. Diakses Pada 20 Oktober 2017.
- Zang, Zang dan Liang. 2017. *An Empirical Analysis of The Green Paradox in China: from Perspective of Fiscal Decentralization*. *Journal Energy Policy* (<http://www.elsevier.com/locate/enpol/>). Available at Science Direct. 103 : 203-211. Diakses 13 Oktober 2017.